



KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mubeng Beteng dan Bekakak Peroleh Paten



Harian Jogja/Dedi Suryanto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (*kiri*) menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dalam acara penandatangan nota kesepakatan, penyerahan piagam penghargaan dan surat pencatatan KIK di Pendopo Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Jogja, Rabu (17/7).

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah DIY kembali mendapatkan penghargaan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X, di Bangsal Kepatihan, Jogja, Rabu (17/7).

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen pemerintah daerah di wilayah DIY dalam menjaga kawasan berbudaya sebagai kekayaan intelektual di DIY. Pemberian penghargaan meliputi, Pemkab Sleman yang berkomitmen menjaga kelangsungan Upacara Adat Bekakak, Pemkab Bantul atas komitmennya menjaga kelangsungan Tari Montro, dan Pemkot

Jogja atas komitmen menjaga tradisi Mubeng Beteng.

Sementara Pemkab Gunungkidul menerima penghargaan atas komitmen menjaga kesenian Tayub Jogja kemudian Pemkab Kulonprogo atas komitmen menjaga kesenian Tari Angguk. Terakhir, penghargaan diberikan kepada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas komitmen melestarikan Upacara Sekaten serta Puro Pakualaman atas komitmen melestarikan Beksan Bondroboyo.

Menurut Sultan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) personal dan komunal banyak dimiliki masyarakat Jogja. Banyak anak muda bergerak di industri kreatif, demikian juga akar komunal yang berada di kearifan lokal dan seni tradisi.

► Halaman 6

Ditai

Positif | Sedera | Untuk Dike

Mubeng Beteng...

"Betapa pentingnya penandatanganan dokumen ini karena hasil inovasi dan kreasi anak negeri akan lebih terlindungi dari pembajakan dan pemalsuan," kata Sultan seuai penandatanganan Nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang ditandatangani langsung oleh Sultan dan Yasonna Laoly.

Di sisi lain, kata Sultan, HKI menunjang sistem dokumentasi yang baik atas kreativitas manusia. Selain untuk melindungi agar karya yang dihasilkan tidak sama. Dukungan dokumentasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan dan pengembangan lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. "Saya berharap HKI dilaksanakan secara cermat dan disosialisasikan secara luas agar pengembangan potensi dan kreatif masyarakat mengalami kemajuan yang signifikan," kata Sultan.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly mengatakan saat ini kekayaan dan keragaman pengetahuan tradisional dan budaya yang luar

biasa belum mendapat kepedulian yang maksimal dari masyarakat. Hal itu mengakibatkan kekayaan budaya di Indonesia bisa berpindah atau diakui negara lain.

"Kita tidak heran jika sekarang ini sedikit demi sedikit kekayaan itu ada yang mulai berpindah ke tangan orang lain atau berkembang di tempat lain karena kita dianggap tidak punya kepedulian terhadap pelestarian dan pengembangannya," kata dia.

Menurut dia, perlindungan kekayaan intelektual juga memiliki peran sangat penting dalam menunjang perkembangan perekonomian dan perdagangan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini disebabkan sistem kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

"Bahkan dalam forum-forum perdagangan internasional isu mengenai perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu isu sentral yang dibahas secara khusus," kata dia.

Politikus PDIP itu mengatakan pada 2013 lalu DIY juga menerima

penghargaan KIK. Dia menilai, DIY tetap layak untuk mendapatkan penghargaan yang sama di tahun ini karena tetap memenuhi lima kriteria yang dijadikan dasar penilaian. "Lima kriteria tersebut adalah kontinuitas dan sosialisasi, kampanye serta pendaftaran kekayaan intelektual perguruan tinggi maupun pemda, adanya keterlibatan daerah yang mendukung kekayaan intelektual, upaya menindaklanjuti pelanggaran kekayaan intelektual, adanya data inventarisasi yang valid dan lengkap, serta adanya data perlindungan," ujar Yasonna.

Yasonna menuturkan penandatanganan MoU antara Kemenkumham dengan Pemda DIY merupakan wujud dan komitmen yang kuat dari Pemda DIY untuk memajukan dan memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional. Menurutnya, sistem kekayaan intelektual tak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005